

ABSTRAK

Nama : Rizka Ramadhani

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Evaluasi Disfungsi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Parkir dan Dinamika Praktik Parkir Formal Informal di Kabupaten Jember

Penelitian ini berangkat dari problematika implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam tata kelola ruang publik, khususnya kebijakan perparkiran di Kabupaten Jember, yang menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas normatif kebijakan dan realitas sosial-ekonomi masyarakat perkotaan. Ketidaksesuaian tersebut memunculkan konsekuensi disfungsional berupa resistensi sosial, berkembangnya praktik parkir formal informal, serta menguatnya pola penguasaan ruang berbasis premanisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi kebijakan tata kelola ruang publik dan menganalisis bagaimana disfungsi implementasi tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya tata kelola alternatif di luar mekanisme formal negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Kerangka analisis memadukan pendekatan *backward mapping* Richard F. Elmore untuk menelusuri *implementation gap* pada level operasional, serta teori sistem sosial Niklas Luhmann untuk menjelaskan kegagalan komunikasi antar subsistem politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta telaah dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran berlangsung secara parsial dan tidak terintegrasi, ditandai oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta dominannya pendekatan legal-administratif yang kurang responsif terhadap ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor informal. Kondisi ini menghasilkan disfungsi sistem formal yang membuka ruang bagi terbentuknya mekanisme pengaturan informal yang bersifat adaptif dan memperoleh legitimasi sosial pragmatis. Praktik parkir informal dan premanisme dalam konteks ini dipahami bukan sekadar deviasi hukum, melainkan sebagai respons struktural terhadap kegagalan kebijakan dalam menjalankan fungsi regulatif, distributif, dan protektif secara efektif. Dengan demikian, tata kelola ruang publik di Kabupaten Jember menunjukkan karakter hibrida yang merefleksikan erosi daya regulasi negara dan menguatnya negosiasi sosial di tingkat lokal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Disfungsi Sistem, Tata Kelola Ruang Publik, Parkir Informal, Resistensi Sosial.

ABSTRACT

Name : Rizka Ramadhani

Study Program : Government Science

Title : *Evaluating the Dysfunction of Local Government Policy Implementation in Parking Governance and the Dynamics of Formal and Informal Parking Practices in Jember Regency.*

This study originates from the problematics of local government policy implementation in the governance of public space, particularly parking policy in Jember Regency, which reveals tensions between the normative rationality of policy and the socio-economic realities of urban society. This misalignment generates dysfunctional consequences, including social resistance, the proliferation of formal–informal parking practices, and the strengthening of space control patterns based on thuggery. The study aims to evaluate the implementation process of public space governance policy and to analyse how such implementation dysfunction contributes to the formation of alternative governance mechanisms outside formal state structures. Employing a qualitative approach with a descriptive-analytical design, this research integrates Richard F. Elmore’s backward mapping approach to trace implementation gaps at the operational level, alongside Niklas Luhmann’s social systems theory to explain communication failures among the political, legal, and socio-economic subsystems. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and analysis of regional policy documents. The findings indicate that parking policy implementation operates in a partial and fragmented manner, characterised by weak inter-agency coordination, limited supervisory capacity, and the dominance of a legal-administrative approach that remains insufficiently responsive to the community’s economic dependence on the informal sector. This condition produces dysfunction within the formal system, thereby creating space for the emergence of adaptive informal regulatory mechanisms that gain pragmatic social legitimacy. Informal parking practices and thuggery, in this context, are understood not merely as legal deviations but as structural responses to policy failure in performing regulatory, distributive, and protective functions effectively. Accordingly, public space governance in Jember Regency demonstrates a hybrid character, reflecting the erosion of state regulatory capacity and the intensification of local-level social negotiation.

Keywords : Public Policy Implementation, System Dysfunction, Public Space Governance, Informal Parking, Social Resistance.

